

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : R a b u
Tanggal : 11 Juli 2018
Pukul : 15.40 s/d 15.50 wib
Acara : Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017

Anggota Yang Hadir :

1. Agus Wibowo
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Daeng M. Yatir, SH
4. Zulfaefi, SE
5. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
6. Hj. Siti Maryani, S.Kom
7. Muttaqin
8. Eddy Tiawarman, SP
9. Azman, SE
10. Hasriawady, S.IP
11. Zulkifli, S.Pd
12. Umar Ali Rangkuti, A.Md
13. H. Amran, S.IP
14. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Tri Jono, S.Kom, MM
Sekretaris : Drs. Edi Yusri

JALANNYA RAPAT

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Pimpinan Rapat :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang masih setia untuk tetap mengikuti acara kita selanjutnya yakni pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati sebelumnya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna saya buka.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sidang Dewan yang terhormat,

Adapun komposisi keanggotaan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 ini, akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada rekan-rekan Anggota atau kita kembalikan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan nama-nama perwakilan dari fraksi masing-masing. Atau mengingat Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan ini terkait dengan anggaran maka bagaimana kalau Panitia Khusus ini komposisi keanggotaannya adalah anggota Badan Anggaran.

Anggota Dewan :

Setujuuuuu..

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Pimpinan Rapat :

Terima kasih. Baiklah akan saya bacakan komposisi keanggotaan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 antara lain :

- Ketua : H. Nesar Ahmad, S.IP
- Wakil Ketua : Agus Wibowo
- Sekretaris : Drs. Edi Yusri
- Anggota : 1. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
- 2. Drg. Raja Miskal
- 3. Zulkifli, S.Pd
- 4. Hj. Siti Maryani, S.Kom
- 5. Hesti Gustrian, S.ST
- 6. Muttaqin Yasir
- 7. Drs. Muhammad Zuhdi
- 8. Suardi, S.Sos
- 9. Bani Suparti, A.Md

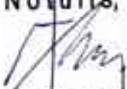
Demikian Komposisi keanggotaan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017. Maka dengan mengucapkan Ahamdulillahirrabil'alamin Rapat Paripurna DPRD pada hari ini saya tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.50 wib.

Notulis,


NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum

Kasubag Risalah dan Persidangan


RANIYAH, S.Sos
NIP.19711106 199803 2 009


RONY FRANTIKA, S.Sos
NIP.19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA II,


H. TRI JONO, S.Kom. MM

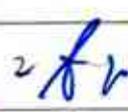
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

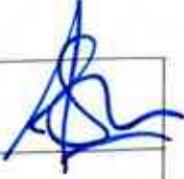
HARI : RABU

TANGGAL : 11 JULI 2018

WAKTU : 15.40 s/d 15.50 Wtb

ACARA : PENGESAHAN PANSUSPEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2017.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7.
8	Ir. ARIF JUMANA S		8.
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12.
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.

16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17.
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20.
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22.
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WKIL KEJUA,

H. TRI , S.Kom, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

- Hari : R a b u
Tanggal : 11 J u l i 2018
Pukul : 14.13 wib s/d 15.35 wib
Acara : 1. Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.
3. Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.

Anggota Yang Hadir :

1. Agus Wibowo
2. H. Tri Jono, S.Kom, MM
3. Daeng M. Yatir, SH
4. Zulfaefi, SE
5. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
6. Hj. Siti Maryani, S.Kom
7. Muttaqin
8. Eddy Tiawarman, SP
9. Azman, SE
10. Hasriawady, S.IP
11. Zulkifli, S.Pd
12. Umar Ali Rangkuti, A.Md
13. H. Amran, S.IP
14. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Tri Jono, S.Kom, MM
Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Pimpinan OPD se-Kabupaten Bintan
3. Eselon II, III dan IV se-Kabupaten Bintan
4. Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan
5. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Rabu, 11 Juli 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

Pergi ke pasar membeli pisang berangan
Pisang di masak dengan pulut ketan
Selamat datang para tamu undangan
Dalam Paripurna Laporan Pertanggungjawaban
 Selayang pandang bintang negeri
 Di iringi tarian riuh rendahnya
 Penyampaian pandangan setiap fraksi
 Di iringi jawaban kepala daerahnya

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan, Yang terhormat para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, Saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Saudara Rekan-rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.
3. Jawaban/ Tanggapan Kepala Daerah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta Hadirin dan Undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wakil Bupati dan hadirin sidang Paripurna yang kami muliakan,

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No. 004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 84 Ayat 2 Point B di katakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika di hadiri oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Bintan. Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 14 orang dan 10 orang belum hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada siang hari ini. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan segenap Anggota DPRD Bintan dan Pemerintahan Daerah atas kerjasamanya dan dukungannya di dalam pembangunan Kabupaten Bintan yang kita cintai ini.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Juli 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Daerah Negara dan Peraturan Pelaksanaan yang telah dituangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011.

Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ini merupakan kewajiban eksekutif kepada legislatif dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah setiap tahunnya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebelum diserahkan ke DPRD harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini dimaksud agar didalam pengelolaan keuangan dan didalam Pelaksanaan Pembangunan adanya keselarasan dari mulai proses perencanaan sampai dengan pengawasan berjalan baik sesuai dengan meksnismenya dalam rangka mewujudkan semangat Responsibilitas dan Akuntabilitas didalam pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun demi kesejahteraan masyarakat Bintang yang kita kasihi.

Audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan pemeriksaan atas kinerja berdasarkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu dijadikan perhatian oleh lembaga perwakilan rakyat, agar semua kegiatan penunjang pembangunan yang dibiayai oleh keuangan negara dan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara tepat sasaran, dan hasil akhirnya BPK akan memberikan pernyataan opini tentang tingkatan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan Pemerintah Daerah. Hasil opini oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017 ini adalah "Wajar Tanpa Pengecualian".

Alhamdulillah ini adalah tahun ketujuh Kabupaten Bintang masi memperoleh opini "WTP" oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dari tahun 2011 sampai tahun 2018 dan merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan sampai saat ini. Diharapkan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali prestasi pembangunan dan prestasi kinerja dimasa yang akan datang.

DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang dan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan serta segenap jajaran Pemerintahan darah Kabupaten Bintang atas kerjasamanya didalam memaksimalkan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan.

Protokol :

Penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan, APBD Tahun Anggaran 2017, Kepada Wakil Bupati disilahkan.

Drs. H. Dalmasry Syam / Wakil Bipati Kabupaten Bintang :

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang, Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bintang, Yang terhormat Saudara Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bintang, Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang, Yang terhormat Saudara Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang, serta Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada kita sekalian,

hingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul untuk menghadiri penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia,

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah. Sesuai amanat dalam Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan petunjuk teknis dari beberapa peraturan perundangan pengelolaan keuangan, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan BUMD, kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi amanat sebagaimana ketentuan di atas, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 secara garis besar dapat kami uraikan sebagai berikut :

I. Laporan Realisasi Anggaran,

Adapun rincian laporan dimaksud sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 1,059 triliun rupiah dari target sebesar 992,32 milyar rupiah atau mencapai 106,82 persen.

Adapun kontribusi dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Keseluruhan PAD pada tahun 2017 terealisasi sebesar 257 milyar rupiah lebih atau mencapai 113,85 persen dari target sebesar 225,73 milyar rupiah lebih selanjutnya pendapatan transfer terealisasi sebesar 802,54 milyar rupiah lebih atau mencapai 104,69 persen dari target sebesar 766,59 milyar rupiah lebih dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah terealisasi sebesar 441 juta rupiah lebih atau mencapai 100 persen.

B. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 1.020 triliun rupiah lebih dari target sebesar 1,128 triliun rupiah lebih atau mencapai 90,39 persen. Rincian alokasi belanja daerah sesuai kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar 446,50 milyar rupiah dari anggaran sebesar 510,48 milyar rupiah atau mencapai 87,47 persen dan Belanja Langsung realisasinya sebesar 573,66 milyar rupiah dari anggaran sebesar 618,16 milyar rupiah atau mencapai 92,80 persen.

Dari realisasi pendapatan maupun belanja sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2017 mengalami Surplus sebesar 39,81 milyar rupiah lebih. Selanjutnya adalah,

C. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2017 adalah 136,32 milyar rupiah lebih, yang merupakan penerimaan pembiayaan sebesar 138,32 milyar rupiah lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar 2 milyar rupiah lebih.

Dari keseluruhan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2017 sebagaimana diuraikan di atas, saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran berkenaan sebesar 176,14 milyar rupiah lebih.

II. Neraca

Untuk posisi neraca Kabupaten Bintan per 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset, berjumlah 2,33 triliun rupiah lebih.
2. Kewajiban, berjumlah 21,91 milyar rupiah lebih
3. Ekuitas, berjumlah 2,31 triliun rupiah lebih

III. Laporan Arus Kas

Untuk tahun pelaporan arus kas tahun 2017, saldo awal per 01 Januari 2017 sebesar 138,45 milyar rupiah lebih, kemudian jumlah total arus kas masuk berjumlah 1,097 triliun rupiah lebih, sedangkan total arus kas keluar berjumlah 1,056 triliun rupiah lebih. Sehingga jumlah saldo kas daerah per 31 Desember 2017 adalah sebesar 179,38 milyar rupiah lebih.

IV. Laporan Operasional

Saldo Laporan Operasional pada tahun 2017 untuk Pendapatan-LO dengan saldo secara keseluruhan sebesar 1,086 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar 283,82 milyar rupiah lebih, Pendapatan Transfer-LO sebesar 712,75 milyar rupiah lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar 89, 79 milyar rupiah lebih, Selanjutnya untuk saldo beban secara keseluruhan sebesar 1.025 triliun lebih dengan rincian alokasi beban sesuai kelompok sebagai berikut :

- a. Beban Operasi sebesar 855,11 milyar rupiah lebih
- b. Beban Transfer sebesar 90,21 milyar rupiah lebih
- c. Defisit Non Operasional sebesar 80,30 milyar rupiah lebih dan
- d. Beban Luar Biasa sebesar 46,44 juta rupiah lebih

V. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pada Tahun 2017 Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar 176,14 milyar rupiah lebih. Berikutnya adalah,

VI. Laporan Perubahan Ekuitas,

Adapun laporan perubahan ekuitas pada tahun 2017 saldo ekuitas akhir sebesar 2,31 triliun rupiah lebih.

Berikutnya adalah,

VII. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Merupakan laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos-pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan

Sdr Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia,

Adapun laporan sebagaimana yang diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan seperti disebutkan pada awal sambutan ini yang merupakan hasil audit BPK RI. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI telah memberikan opini atau penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2017 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Penilaian WTP tersebut adalah ke tujuh kalinya secara berturut turut sejak tahun 2011. Hal tersebut dapat kita capai karena adanya kerja sama yang sangat baik antara pihak eksekutif dengan Ketua dan Anggota DPRD yang terhormat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan serta Hadirin yang berbahagia,

Kita yakin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Dan dengan keyakinan itulah, saya menyerahkan materi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bintan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan.

Sebelum diakhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun sebagai berikut :

Lagu irama rentak sepadan,
Merdu suara putri kayangan .
pertanggungjawaban APBD telah diserahkan
Mohon pembahasannya segera dilaksanakan
 Jumpa dulang berisi intan
 Menjadi daulat tahtanya Sultan.
 Terima kasih kami ucapkan
 Atas upaya dalam pembahasan

Terima kasih atas perhatiannya, akhir kata Billahi Taufik wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan 11 Juli 2018, Wakil Bupati Bintan, H. Dalmasri Syam ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bintan, Kepada Fraksi Partai Golongan Karya disilahkan.

Hasriawady, S.IP/ Fraksi Golongan Karya:

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan, Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan, Yang kami hormati Undangan, rekan-rekan Insan Pers dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintan, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita semua masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti sidang Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan

agamanya masing-masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

Terima kasih dan rasa syukur, sampai saat ini Fraksi Partai Golongan Karya masih berkesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum pada forum yang sangat terhormat ini.

Rapat Dewan terhormat,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang "Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017", perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintang menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Kabupaten Bintang terhadap di buatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sehingga dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah ini maka Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintang sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi penggunaan anggaran tersebut apakah telah sesuai atau belum dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai salah satu acuan agar kegiatan pembangunan senantiasa konsisten antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan.
2. Terhadap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintang masih melihat beberapa kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD terkait perlu di evaluasi dan di tingkatkan agar realisasi pada kegiatan tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi.
3. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bintang memberikan masukan kepada beberapa SKPD di antaranya :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang, agar melakukakn kajian kembali dalam rangka merencanakan penganggaran untuk Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang di peruntukkan untuk masyarakat miskin supaya ada penambahan kuota. Karena di lapangan masih di temukan banyak masyarakat yang menunggak iuran BPJS Mandiri di keranakan tidak mampu membayar.
 - b. Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman , agar sebaik mungkin dalam perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan supaya tidak terhambat pelaksanaan pekerjaan tersebut dan juga agar tepat sasaran serta tepat guna agar dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bintang.

Contoh :

 - Ada sorotan masyarakat terhadap pembangunan Mesjid yang tidak terlaksana dengan baik
 - Pembangunan Comunity Center yang di rasa kurang manfaat, karena telah ada gedung LAM yang selalu di pergunakan untuk kegiatan masyarakat
 - Pembangunan Gerbang masuk Ibukota Kabupaten Bintang yang tidak selesai.
 - c. Dinas Pendidikan, agar melakukan pengecekan kendaraan transportasi siswa-siswi didik yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintang, serta melakukan pembinaan kepada operator sarana transportasi supaya beberapa kasus kecelakaan sarana transportasi tersebut tidak terulang kembali.

4. Beberapa masukan ini penting Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan sampaikan agar Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan dapat terlaksana dengan baik dan dapat di rasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bintan dengan baik pula.

Rapat Dewan terhormat,

Demikian pandangan umum ini di sampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus DPRD Kabupaten Bintan. Bila dalam penyampaian pandangan umum ini terdapat kekurangan, kekeliruan dan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta rapat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya atas segala niat baik kita. Aamiin

"Partai Golkar berwarna kuning
Partai PAN berwarna biru
Dengan kita selalu berunding
Membawa perahu Bintan semakin melaju "

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 11 Juli 2018. Ketua, Hj. Fiven Sumanti, S.IP ditandatangani. Sekretaris, H. Amran, S.IP ditandatangani.

Protokol :

Kepada Fraksi Partai Demokrat disilahkan

Azman, SE/Anggota DPRD Kabupaten Bintan :

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara sekretaris daerah kabupaten bintan, Yang terhormat Saudara saudara unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Yang terhormat Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan. Yang terhormat Para Undangan dan Rekan-Rekan Insans Pers, serta Hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nyalah kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dewan, dengan agenda pokok penyampaian dan pandangan umum fraksi-fraksi dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku juru bicara fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat.

Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat,

Sebagaimana rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Fraksi Demokrat memberikan Pandangan Umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD Tahun Anggaran 2017 tetap posisi anggaran defisit. Realisasi APBD tahun 2017 ialah Pendapatan 1 triliun lebih yaitu Rp. 1.059.986.596.321,70 (1 triliun 59 milyar 986 juta 596 ribu 321 rupiah 70 sen), Belanja Rp.1.020.169.060.411,87 (1 triliun 20 milyar 169 juta 60 ribu 411 rupiah 87 sen), Surplus/Defisit Rp.39.817.535.979,83 (39 milyar 817 juta 535 ribu 979 rupiah 83 sen) dengan surplus/defisit setelah perubahan Rp.136.324.168.358,81 (136 milyar 324 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen) sekitar (29,21%), Sedangkan Pembiayaan Penerimaan Rp.138.324.168.358,81 (138 milyar 324 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen) dan pembiayaan pengeluaran sebesar 2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah). Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional dimasa-masa mendatang. Untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrument anggaran berbasis kinerja untuk sepenuhnya dilaksanakan.
2. Kami Fraksi Demokrat sangat berharap untuk peningkatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur harus menjadi komitmen kita bersama dalam pelaksanaannya. Perencanaan kegiatan haruslah dipikirkan secara matang agar peningkatan pembangunan yang bisa lebih merata dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Bintan secara luas. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan serta infrastruktur lainnya, yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah padat penduduk dipertanian maupun pedesaan, serta fasilitas publik yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, hendaknya bisa ditingkatkan lagi, dan kami berharap agar tata ruang pembangunan kabupaten Bintan dapat mengarah terhadap pengembangan sektor ekonomi secara merata di wilayah Kabupaten Bintan. Fraksi Demokrat menginginkan peningkatan pengawasan dalam pembangunan sehingga dapat berjalan secara merata, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bintan dan diharapkan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata serta lebih diperhatikan.
3. Fraksi Partai Demokrat berharap untuk bisa memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan, agar program program prioritas untuk kepentingan langsung masyarakat, agar dapat membantu memecahkan segala keluhan masalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan, kami Fraksi Demokrat menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 11 Juli 2018, Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bintan dtandatangani, Ketua Zulkipli, S.Pd, Sekretaris Zulfaefi, SE ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan dipersilahkan.

Umar Ali Ranguti, A.Md/Fraksi PDI-Perjuangan:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang

terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Para Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 11 Juli 2018 kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir dan bathin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas Penyampaian Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 pada kesempatan pertama.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pertama-tama kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang sudah 7 tahun berturut-turut mendapatkan opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan.

Sebagaimana kita ketahui APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka harus diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas.

1. Pada kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut :Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, terkait Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Rp 1.059.986.596,391,70 (1 triliun 059 milyar 986 juta 596 ribu 391 rupiah 70 sen)
 - 2) Belanja Rp 1.020.169.060.411,87 (1 triliun 020 milyar 169 juta 060 ribu 411 rupiah 87 sen)
 - 3) Surplus sebesar Rp 39.817.535.979,83 (39 milyar 817 juta 535ribu 979 rupiah 83 sen)
 - 4) Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp 138.324.168.358,81 (138 milyar 326 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen). Dan, penerimaan dari pengembalian pokok dana bergulir Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah), sehingga total Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 138.326.168.358,81 (138 milyar 326 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen).
 - b. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp 2.000.000.000,00,- (2 milyar rupiah).
 - c. Pembiayaan netto sebesar Rp 136.326.168.358,81 (136 milyar 326 juta 168 ribu 358 rupiah 81 sen).

- 5). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 176.143.704.338,64 (176 milyar 143 juta 704 ribu 338 rupiah 64 sen).
2. Dalam realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, Pendapatan mencapai angka Rp 1.059.986.596.391,70 (1 triliun 059 milyar 986 juta 596 ribu 391 rupiah 70 sen). Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp. 1.048.554.882.696,78 (1 triliun 048 milyar 554 juta 882 ribu 696 rupiah 78 sen) angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.431.713.694,92 (11 milyar 431 juta 713 ribu 694 rupiah 92 sen) kenaikan tersebut terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Sedangkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari dana perimbangan, terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, ketergantungan daerah kepada dana perimbangan ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu dilakukana optimalisasi dari semua potensi pendapatan asli daerah dan pajak daerah, termasuk yang bersumber dari dana bagi hasil pajak lainnya.
 3. Pada tahun anggaran 2017 ini realisasi belanja berjumlah Rp 1.020.169.060.411,87 (1 triliun 020 milyar 169 juta 060 ribu 411 rupiah 87 sen), Untuk Belanja modal pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.843.899.618,38 (10 milyar 843 juta 899 ribu 618 rupiah 38 sen) dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah Rp. 211.736.794.098,00 (211 milyar 736 juta 794 ribu 098 rupiah) , diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang komposisi Belanja Modal mengalami peningkatan.
 4. Dengan komposisi pada struktur APBD tahun 2017 tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk memaksimalkan setiap penggunaan anggaran pembangunan. Terutama untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang bisa memberikan dampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain.
 5. Dengan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya untuk mendapatkan anggaran pembangunan yang pembiayaannya dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga, percepatan pembangunan bisa tetap dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran.
 6. Perlu dilakukan berbagai efektifitas dan efisiensi di seluruh sektor serta bidang. Terutama di sektor Belanja Tidak Langsung juga belanja barang. Efektivitas dan efisiensi mutlak dilaksanakan dan menjadi skala prioritas yang dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya.

Rapat Dewan yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 yang dapat kami sampaikan, semoga Saudara Bupati dapat menindaklanjutinya dan diharapkan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas dapat berlangsung dengan lancar dan aspiratif. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian Pandangan Umum ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 11 Juli 2018. Ketua, Hj. Siti Maryani, S.Kom ditandatangani. Sekretaris, Umar Ali Rangkuti, A.Md ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi PKS dipersilahkan.

Muttaqin Yasir/Fraksi PKS:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang, Saudara-Saudara Anggota Dewan, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Rekan-Rekan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat-sahabat-Nya dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 320 ayat 1, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Berkenaan dengan telah disampaiannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama ranperda dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengacualian) dalam LHP BPK RI terhadap APBD TA 2017 dan memasukannya (opini dan rekomendasi) menjadi bagian dari Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017. Kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak dan stakeholder yang telah bekerja keras.
2. FPKS berharap segera menuntaskan tindak lanjut LHP BPK RI terhadap semua temuan dan rekomendasi BPK RI tahun 2017 dan temuan BPK RI tahun sebelumnya. Yang kami pertanyakan :
 - a) Apakah sudah ada progres untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI tersebut tahun 2017 dan tahun sebelumnya?
 - b) FPKS meminta disetiap Pertanggungjawaban APBD dilampirkan laporan tindak lanjut penyelesaian Rekomendasi LHP BPK di tahun sebelumnya.
 - c) Mengusulkan dibentuknya Tim Evaluasi dan Monitoring yang akan memantau rencana dan pelaksanaan terhadap rekomendasi LHP BPK.
3. Dengan tercapainya predikat WTP dalam LHP BPK terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017, maka Fraksi PKS mendorong dan mendukung semua pihak, agar dapat bekerja keras kembali dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan Predikat WTP pada LPJ APBD di tahun berikutnya. Selanjutnya FPKS mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bintan tidak berpuas diri dengan capaian WTP ini. Kami berharap lebih dari pada itu agar Pemerintah Kabupaten Bintan juga fokus kepada Audit Kepatuhan (compliance audit) dan Audit Kinerja (performance audit). WTP dalam audit

kuangan tidaklah cukup, karena sebagai lembaga pemerintah yang melayani kepentingan publik, Audit harus mencakup tiga hal, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja. Audit kepatuhan dan audit kinerja adalah audit yang lebih dalam dibandingkan dengan audit keuangan. Audit kepatuhan adalah audit yang menilai kesesuaian pengeluaran pemerintah dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan audit kinerja adalah perluasan dari audit keuangan, dimana lebih memfokuskan pada tujuan pengeluaran yang meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Sehingga dengan ketiga Audit ini kita dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang bagus yang tercermin dalam predikat WTP juga berdampak kepada publik yang akan nampak dalam Audit kepatuhan dan Audit kinerja tersebut.

1. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) ranperda ini diketahui bahwa Anggaran Pendapatan setelah perubahan tahun 2017 adalah Rp. 992.328.198.425,14 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.059.986.596.391,70 sehingga terjadi selisih lebih Rp. 67.658.397.966,56. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan cukup baik terlihat dengan geliat ekonomi masyarakat dan adanya potensi ekonomi yang dimiliki. FPKS berharap Pemerintah Kabupaten Bintan di tahun selanjutnya dapat lebih lagi mengoptimalkan potensi pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Diantaranya dengan optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi serta menggali sumber-sumber PAD baru.
2. Dari sisi belanja, diketahui bahwa anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.128.652.366.783,95,- sementara realisasi belanja Rp. 1.020.169.060.411,87 sehingga selisih lebih/(kurang) (Rp. 108.483.306.372,08),-, artinya masih tersedia dana 108 Milyar lebih yang mestinya dibelanjakan sesuai rencana program tidak digunakan atau tidak dibelanjakan. FPKS menilai masih lemahnya sistem perencanaan yang dilakukan, oleh karena itu kedepan harus dapat diperbaiki sehingga perencanaan belanja dapat terealisasi 100% terutama belanja yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi prioritas kepentingan umum masyarakat Kabupaten Bintan.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban secara proporsional. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya melalui Panitia Khusus nantinya. Selanjutnya Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 11 Juli 2018. Ketua, drg. Raja Miskal ditandatangani. Sekretaris, Sahak ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi PAN dipersilahkan.

Eddy Tiawarman/Fraksi PAN

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang Terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang Terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yang Terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Yang Terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji

syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridhonya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun bathin.

Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bintan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ini, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut:

1. Kami memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh saudara Bupati beserta jajaran di bawahnya untuk menyelesaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran 2017 ini. Namun, Fraksi PAN mengingatkan, keterlambatan pembahasan dan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Kabupaten Bintan Tahun 2017 ini berpotensi melanggar Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 298 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101, yang menyebutkan bahwa pengesahannya tidak melebihi batas waktu maksimal enam bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Dokumen Ranperda PP APBD 2017 ini sendiri baru masuk ke DPRD Bintan pada akhir Juni. Praktis kita hanya memiliki waktu dua pekan untuk menyelesaikan pembahasan dokumen ini. Tentu waktu kurang lebih dua pekan kita rasakan sangat sedikit, terutama dalam upaya kita untuk mewujudkan pembahasan PP APBD yang berkualitas sebagai landasan untuk pelaksanaan APBD di tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, kami berharap agar Saudara Bupati dapat memperhatikan agar dalam pembahasan dokumen PP APBD di tahun mendatang, dapat dilakukan lebih awal, sehingga tidak melebihi ketentuan batas akhir enam bulan sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.
2. Pada tahun 2017 jumlah belanja tidak langsung Lebih kurang 45,32% dan belanja langsung sebesar 54,68 %, Komposisi persentase ini menunjukkan trend angka yang positif terhadap APBD Kabupaten bintan, kami mengharapkan hal ini dapat terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya dan Fraksi kami mengharapkan persentase ini terus dapat didorong mencapai persentase 60 % dan belanja tidak langsung sebesar 40%, sehingga kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan maksimal.
3. Kami mencermati bahwa jumlah SILPA Pada tahun anggaran 2017 lebih besar dibandingkan SILPA pada tahun anggaran 2016 yang berjumlah Rp. 138.324.168.358, 81. Kami berharap tingginya jumlah pos dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada APBD tahun 2017 lalu, yang mencapai Rp 176.143.704.388,64, hendaknya di tahun-tahun mendatang dapat diminimalisir dalam bentuk penggunaan bagi program-program yang menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Mohon penjelasan Saudara Bupati.
4. Fraksi PAN pada kesempatan ini mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan bahwa kita sedang berada di ambang krisis ekonomi kawasan. Hal ini akan berpotensi mengakibatkan tutupnya sejumlah usaha, dimana nantinya akan menyebabkan kenaikan angka pengangguran dan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, hendaknya Saudara Bupati beserta jajarannya dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mendasar untuk menjaga agar kondisi perekonomian Kabupaten Bintan dapat stabil.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan memberikan sejumlah pertanyaan terhadap Ranperda ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan. Bila ada yang terlebih dan terkurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi kabupaten termaju di Provinsi Kepri.

Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 10 Juli 2018. Ketua, Hesti Gustrian, S.St ditandatangani. Sekretaris, Eddy Tiawarman, Sp ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan dipersilahkan.

Andreas Salim/Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Sebelumnya ingin mengawali dengan dua buah bait pantun, antara lain :

Melati kuntum tumbuh melata
 Sayang merbah di pohon cemara
 Assalamualaikum mulanya kata
 Saya sembah pembuka bicara
 Ada ketikanya mata silap memandang
 Telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata
 Pikiran khilaf menafsir dan hati silap menduga
 Kami memohon ma'af lahir dan batin

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan, Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah pada saat ini, setelah melalui hari demi hari dan proses yang begitu panjang, kita bisa kembali dalam rapat paripurna dalam agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, kami dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan akan menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk disampaikan dalam Pandangan Umum ini, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Maka, Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat yang dapat digunakan untuk pencapaian visi dan misi suatu daerah yang tentunya berhubungan erat dengan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dari laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi masih terdapat beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum maksimal dalam penggunaan atau realisasinya. Masih ada beberapa OPD yang realisasi anggarannya di bawah 90%. Mohon penjelasan.

2. Pada point 7.2.1.4 arah dan kebijakan ekonomi daerah, terdapat beberapa kebijakan sektoral yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai upaya untuk mencapai PDRB tahun 2018, yakni sektor pertanian (perikanan dan kelautan); sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor lainnya. Mohon penjelasan, bagaimana kondisi sektor-sektor tersebut pada tahun 2017.
3. Pada point 7.2.1.5. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Bintan, dalam penerapan MEA terdapat lima tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2018 (mohon koreksi, tertulis tahun 2016). Tantangan tersebut adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; sarana dan prasarana pendukung di bidang pariwisata; sektor pertanian; efektivitas anggaran; serta kualitas pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari penciptaan lapangan pekerjaan. Mohon penjelasan hal-hal apa yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut.
4. Pada point 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan terdapat 4 kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yakni kualitas SDM; pengelolaan barang dan jasa; serta perencanaan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar hambatan tersebut bisa diatasi dan tidak terulang permasalahan tersebut di tahun-tahun berikutnya. Mohon penjelasan!

Demikianlah pandangan umum kami dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan DPRD Kabupaten Bintan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Semoga dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam rangka menjadikan Bintan Gemilang. Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan Kabupaten Bintan 2018
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 04 April 2018. Ketua, Drs. Muhammad Zuhdi ditandatangani. Sekretaris, Helmy, SH ditandatangani.

Protokol :

- Penyerahan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati.
(Pelaksanaan penyerahan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati)
- Tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

H. Dalmasri Syam/ Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan, Yang terhormat Saudara Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dan Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka Penyampaian Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017.

Sebelum sampai pada materi rapat paripurna, melalui kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap anggota dewan, melalui fraksi-fraksi, yang telah mempelajari dengan sungguh-sungguh dan seksama atas rancangan perda sebagaimana tersebut diatas, yang telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya masing-masing. Semua pandangan yang disampaikan, tentunya merupakan masukan yang berharga, dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam Rapat-Rapat Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran untuk penyempurnaan ranperda tersebut.

Saudara Ketua, Wakil Ketua Dan Segenap Anggota Dprd Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017, bersama ini akan kami sampaikan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan dan pandangan dari masing-masing fraksi, dengan urutan sebagai berikut : Fraksi Partai Golongan Karya; Fraksi Demokrat; Fraksi PDI Perjuangan; Fraksi PKS; Fraksi Amanat Nasional; dan Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan (F-GHNP) terhadap pertanyaan dan pandangan yang sama dari beberapa fraksi, penjelasannya tidak akan kami ulangi, namun cukup kami berikan jawabannya sekaligus melalui jawaban atas pertanyaan atau pandangan dari fraksi-fraksi yang akan kami lampirkan.

Saudara ketua, Wakil ketua dan segenap Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Pemerintah Daerah berterima kasih atas apresiasi yang diberikan, saran dan masukan dari semua fraksi menjadi perhatian kami dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, serta pertanggungjawaban dan yang terakhir pelaporan keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah kabupaten bintang mencapai tingkat yang optimal.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD serta Hadirin yang saya hormati

Demikian jawaban secara garis besar atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa jawaban atau penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum oleh karenanya untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal yang masih perlu didalami, dapat kiranya nanti dibahas pada kesempatan rapat-rapat komisi maupun rapat-rapat Badan Anggaran sedangkan saran-saran yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bintang. Terima kasih atas perhatiannya, akhir kata Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 11 Juli 2018. Wakil Bupati Bintang H. Dalmasri Syam ditandatangani.

Protokol :

Penutupan Rapat Paripurna DPRD oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintang

H. Tri Jono, S.Kom.MM /Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintang :

Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Bintang yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD. Demikian rangkaian acara telah kita ikuti bersama,

maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para hadirin dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan hari ini Senin, 11 Juli 2018 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan dua bait pantun, yakni :

Bunga rampai harum mewangi

Laila Canggung lagu diberi

LKPJ disampaikan setahun sekali

Pertanggungjawaban kepada negeri

Gelapnya hari tanda nak hujan

Pergilah kepekan menjajakan ubi

Silap salah kami mohon dimaafkan

Demikianlah acara pada hari ini

Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.35 wib.

Notulis,



NETTY NURZANNAH, A.Md

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum



RAMLAH, S.Sos

NIP.19760412 200604 1 015

Kasubag Bisalah dan Persidangan



RONY FRANTIKA, S.Sos

NIP.19711106 199803 2 009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,**



Drs. EDI YUSRI

Pembina utama Muda

NIP.19671108 199002 1 004

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA II,**



H. TERJONO, S.Kom. MM

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

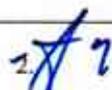
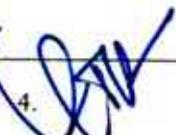
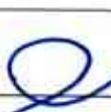
H A R I : Rabu

T A N G G A L : 11 Juli 2018

W A K T U : 14.13 s/d 15.35 wib

A C A R A :

1. Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.
2. Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.
3. Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1.
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7.
8	Ir. ARIF JUMANA S		8.
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12.
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 

14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17.
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20.
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22.
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	✓25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,

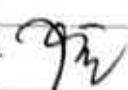
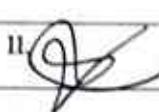
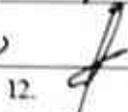
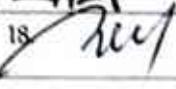

H. TRI ANO, S.Kom, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

- Hari : Rabu
 Tanggal : 11 Juli 2018
 Waktu : 1. Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan
 Acara : Tahun Anggaran 2017
 2. Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Angga
 3. Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	KM Aenis	INSPEKTUR	2. 
3.	Makhyur. 2	Ka. BUBUPARA	3. 
4.	Nani, Sunarni	Kasi Pengawasan	4. 
5.	Sams DA Wani	KADINKAS	5. 
6.	Arizal Kadar	Ka. DUK	6. 
7.	KHAIRUL	KADIS KET. PAUGAN	7. 
8.	M.PANCA AZOIGONA	KALAK BPBD	8. 
9.	Ety Sunyuni	Kasubj Peng. Progn DPMPSPK	9. 
10.	DEVI OCTARINA	KASI PERIZINAN TK DPMPSPK	10. 
11.	Sastria Rini	Kasubj Sertifikat Kepag DPMPSPK	11. 
12.	Syaiful Ikhsan	Kabid HI. Nalok	12. 
13.	Sukroni A	Kabid Lanas	13. 
14.	Isref Sultana	Kasi Perleasan Asamptan Kerj DPMPSPK	14. 
15.	Veto monica	Kasi persyaratan Kerj DPMPSPK	15. 
16.	TABRAVI	KADID TRAN TIKUM	16. 
17.	SAMSUDATA	KASI DINDAS	17. 
18.	Zafri	Kabid Pelatihan & Penerimaan DPMPSPK	18. 
19.	Herika Silvia	Kabag Pemerintahan Setda	19. 
20.	Naharudin	Kabi Sor	20. 

21.	INDRA	PROLOG	21.	
22.	SURYANTO AP.	DIPTERIK	22.	
23.	FREDERICK	DIPMTSP TK	23.	
24.	MIKWANON	Kamirnan	24.	
25.	Andriani	Dinas Kehutanan Provinsi	25.	
26.	GORDIAN PUNDA	Dinas Kehutanan Provinsi	26.	
27.	Admawati	ka EPS	27.	
28.	KALDI	Distrik I	28.	
29.	Tebuh Caji	Kadum Kesay. Arum	29.	
30.	HARJAH	Eksternis BAKAS	30.	
31.	Nursani Jambani	Kasubid Verifikasi BKKAS	31.	
32.	to Jhon Yanti	Kabid Keaman. Provis	32.	
33.	SAIET SUMARSONO	PH. Camat Gunungkidul	33.	
34.	Siti Haryani	Resbangpol.	34.	
35.	Sri Martini	Kabid Resbangpol	35.	
36.	M. Izzan	Kabid BM PUPR	36.	
37.	M RIZKI SAPUTRA	DIPMTSPTE	37.	
38.	R. RABRIH	DISDIK	38.	
39.	HOSRIL	DISDRC	39.	
40.	DEVI RADIKHA	DISPORA	40.	
41.	Azwac.	Camat Binuel.	41.	
42.	HANAN BASRI.	Kabid kekelog BPPD	42.	
43.	EKY.S	Kabid Perkeluarga	43.	
44.	DEWI ANEGRAHINI	BPKAD	44.	
45.	SEMARMI	BPKAD	45.	
46.	Eddy Firman	BPKAD	46.	
47.	SAPONI	"	47.	
48.	M. Syarifur	Kabid Jansos Dinas	48.	
49.	Nurhayati	Kabag Hukum	49.	
50.	Ii Santo	Kabag pembina	50.	

51.	Mispane	Bleppo	51.	
52.	ERI Widayati	BICPPD	52.	
53.	Khamisah	BKPPD	53.	
54.	Pidayana	Kabubidit Inka	54.	
55.	Zulfira Anwar	Kasi Jaminan Sosial	55.	
56.	Sg. Hidar	Kabid Keas dan Kes	56.	
57.	IDRIS	Kabubidit	57.	
58.	Utung S	Keas dan Kes	58.	
59.	SALMAN	Kasi Lem Sos	59.	
60.	LOSMEN S	Ka. Plan. IT. Sosial	60.	
61.	SUDANO	Bud Pita	61.	
62.	Dad. Rival	Di Kelengkapan Pnyzn	62.	
63.	MASRULLAH	Kasubag Kesra	63.	
64.	MASLAINI	Kabid Lujansu Diwor	64.	
65.	ASRI	Kabid PSUBZ DLH	65.	
66.	Dwi kori andayani	Sekretaris DLH	66.	
67.	Fidayana ti	Sekretaris Diusas	67.	
68.	B. Kristiyanto	Kasi Penjurangan Sampah DLH	68.	
69.	Moh. Nur A.	Kasubid	69.	
70.	yusuf Sidiq, Mm.	Kadis Pula	70.	
71.	Husi	Camat BT.	71.	
72.	PILIHAN	Camat Manty	72.	
73.	Rim Piasa	Pmpinan Lab. BPR BTM	73.	
74.	Syular Jul	Satpol PP	74.	
75.	Devi Harianty	Kasubag Pen. Masy	75.	
76.	RAHADANSYAH FAZAR	Kasubag Hitem Sekwan	76.	
77.	PRITWID	Didocokot PIC	77.	
78.	PEKI DARUS	Kasubag. Kasas dan. Kasra	78.	
79.	Puang Angrami	Kac Toapap	79.	
80.	Muhammad	Camat BK	80.	

81.	Kartini	Ka DPKD	81
82.	MARYANTI NURSIDA	Kabid Pemb. PAUD	82.
83.	DARWINA	Kesekretariatan Pihnas	83.
84.	Fitriani	Kecamatan Marek	84.
85.	Joreh	K/Keas D	85.
86.	Hasan.	Dispar.	86.
87.			87.
88.			88.
89.			89.
90.			90.
91.			91.
92.			92.
93.			93.
94.			94.
95.			95.
96.			96.
97.			97.
98.			98.
99.			99.
100.			100.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

WAKIL KELOA,

H. TRI AND, S.Kom, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

Drs. EDI YUSRI

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004